

BAB IV
DAMPAK TERJADINYA KUDETA MILITER DI REPUBLIK FIJI
TAHUN 1987

A. Dampak Kudeta Militer Bagi Masyarakat Fiji

Para kepala suku Fiji dari seluruh penjuru negeri yang terdiri atas 300 buah pulau itu hari Senin mengadakan pertemuan tertutup guna memperdebatkan perubahan konstitusional yang dapat menjamin bahwa para pemimpin masyarakat India tidak akan pernah lagi memperoleh mayoritas dalam pemerintahan, kata sumber-sumber yang dekat dengan pertemuan tertutup itu.

Ganilau meminta agar diadakan persidangan pertama dewan penasehat khusus yang akan membantunya memerintah negeri itu sampai konstitusi diubah dan pemilihan diselenggarakan. Ia menunjuk Sir Kamisese Mara, bekas perdana menteri yang memerintah negeri itu sejak merdeka sampai pemilihan bulan lalu, untuk membantu mengawasi urusan luar negeri. Rabuka diberi tanggung jawab di bidang keamanan.

Pasukan yang mengenakan seragam samaran terus berpatroli di jalan-jalan raya ibukota Fiji, Suva, pada saat para pendukung Bavadra, yang meliputi satu seksi besar masyarakat bisnis India, merencanakan pemogokan sebagai protes dan menutup toko-toko pada hari Selasa. Para anggota koalisi terguling pimpinan Bavadra melukiskan kudeta tersebut sebagai tindak terorisme dan berjanji akan melancarkan kampanye protes nonkekerasan untuk mengusahakan agar pemerintahan Bavadra didudukkan kembali.

Bavadra memboikot persidangan Dewan Penasehat Khusus tersebut hari Senin meskipun kepadanya dan kepada anggota koalisinya yang lain ditawarkan

tempat dalam komite beranggota 19 orang itu. Bavadra mengatakan kepada para perwira bahwa ia sedang mempertimbangkan untuk menghadiri pertemuan forum Pasifik Selatan di Apia Samoa Barat, akhir pekan depan. Kabinet Bavadra yang terdiri atas 12 orang meliputi tujuh orang India dan lima orang Fiji, termasuk dia sendiri.¹

Letkol Rabuka segera membentuk Dewan Penasehat setelah melakukan kudeta. Letnan Kolonel Rabuka termasuk dalam daftar 18 orang anggota badan penasehat yang ditunjuk Gubernur Jenderal Sir Penaia. Kepada para wartawan Dr Bavadra mengatakan, dengan bagian utama pendukung lainnya yang warga keturunan India, wilayah bagian barat itu kini menjadi pangkalan utama kekuatannya.

Pihaknya kini juga sedang mempertimbangkan suatu bentuk protes lainnya, yakni kampanye pembangkangan umum terhadap Dewan Penasehat yang didukung militer. Protes ini sama sekali bebas dari kekerasan, ujar bekas perdana menteri itu. Bavadra serta sejumlah tokoh masyarakat Melanesia berbicara sekitar lima jam di depan sekitar 500 orang peserta pertemuan sebelum suatu komite mundur guna membahas rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan pertemuan itu.

Di bagian pidatonya dalam Bahasa Fiji, Bavadra mengecam pemerintah militer Letkol Sitiveni Rabuka yang merebut kekuasaan pada 14 Mei lalu. Ia juga mengecam komisi Dewan Penasehat beranggota 19 orang yang jumat malam

¹ Kedaulatan Rakyat, *Kabinet Baru Berhasil dibentuk: Negara-Negara Persemakmuran Mengutuk Pelaku Kudeta di Fiji, Edisi Sabtu Pon 16 Mei 1987 (18 Pasa 1919) Tahun XLII No. 225*, Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, 1987, hlm. 10.

diangkat Gubernur Jenderal Ratu Penaia Ganilau setelah dewan ketua-ketua adat di Suva menyelenggarakan pertemuan empat hari.²

Para kepala suku Fiji dari seluruh penjuru negeri yang terdiri atas 300 buah pulau itu hari Senin mengadakan pertemuan tertutup guna memperdebatkan perubahan konstitusional yang dapat menjamin bahwa para pemimpin masyarakat India tidak akan pernah lagi memperoleh mayoritas dalam pemerintahan, kata sumber-sumber yang dekat dengan pertemuan tertutup itu. Ganilau meminta agar diadakan persidangan pertama dewan penasehat khusus yang akan membantunya memerintah negeri itu sampai konstitusi diubah dan pemilihan diselenggarakan.

Ia menunjuk Sir Kamisese Mara, bekas perdana menteri yang memerintah negeri itu sejak merdeka sampai pemilihan bulan lalu, untuk membantu mengawasi urusan luar negeri. Rabuka diberi tanggung jawab di bidang keamanan.

Sementara itu, sikap yang diambil oleh gubernur jenderal atas kudeta yang dipimpin oleh Letkol Rabuka ini sungguh diluar dugaan. Gubernur Jenderal Fiji Ratu Sir Penaia Ganilau, Senin secara resmi memberikan amnesti kepada Letkol Sitiveni Rabuka serta pasukan yang melakukan kudeta militer bulan ini, sementara para pendukung pemerintah terguling akibat kudeta itu bersiap-siap melakukan pemogokan sebagai protes. Karena ketegangan rasial dan geografis masih terus mendidih, polisi dan militer negara Kepulauan yang strategis di kawasan pasifik

² Kedaulatan Rakyat, *Pasukan Australia ke Fiji: Bantu Kemungkinan Evakuasi, Edisi Sabtu Kliwon 25 Mei 1987 (27 Pasa 1919) Tahun XLII No. 234*, Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, 1987, hlm. 10.

itu menyita senjata dalam setiap kedatangan mereka di toko-toko dan rumah-rumah penduduk.

Sebuah pengumuman dalam lembaran resmi pemerintah menyatakan. Ganilau, Wakil Pribadi Ratu Elizabeth yang merupakan Kepala Negara Fiji, memberikan amnesti kepada Rabuka serta pasukan yang menculik para anggota kabinet Perdana Menteri Timochi Bavadra dengan todongan senjata, karena mereka telah menempuh perjalanan mereka dengan menghindari pertumpahan darah. Kudeta pimpinan Rabuka itu baru-baru ini menggulingkan pemerintahan terpilih pimpinan Bavadra, yang memberikan kepada masyarakat keturunan India mayoritas dalam pemerintahan untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan Fiji dari Inggris tahun 1970.³

B. Dampak Kudeta Militer Bagi Hubungan Internasional

Sebagai suatu kawasan yang pulau-pulaunya menyebar secara tidak merata di samudera pasifik, tidak heran bila negara-negara pasifik selatan mendapat perhatian dari berbagai negara, termasuk negara-negara yang berada di pinggir (*pasific rim*). Sekalipun demikian, besar kecilnya perhatian negara-negara luar terhadap kawasan tersebut tergantung oleh beberapa faktor. Antara lain kepentingan nasionalnya, tingkat kesulitan dalam transportasinya, sejarah, dan lain-lain. Oleh karena itu, tidak semua negara luar ikut hadir dalam perkembangan politik, sosial-ekonomi, serta pertahanan-keamanan di kawasan ini.

³ Kedaulatan Rakyat, *Rabuka Secara Resmi Memperoleh Amnesti, Edisi Rabu Wage 27 Mei 1987 (29 Pasa 1919) Tahun XLII No. 236*, Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, 1987, hlm. 1.

Ditinjau dari sejarahnya, sejak abad ke-17 berbagai negara Eropa, seperti Belanda, Inggris, Perancis, Jerman, Spanyol, dan Portugis, pernah terlibat dalam percaturan politik, sosial-ekonomi, dan pertahanan di kawasan ini. Mereka juga sedikit banyak telah membentuk tatanan politik masyarakat di wilayah-wilayah yang dikuasainya. Sebagian negara-negara Eropa, seperti Spanyol, Portugis dan Jerman, telah meninggalkan kawasan ini awal abad ke-20. Sementara Inggris dan Belanda meninggalkan kawasan ini sejak berakhirnya PD II. Sedangkan Perancis adalah satu-satunya negara EROPA yang masih melibatkan diri dalam percaturan politik regional di Pasifik Selatan.⁴

Kudeta militer yang terjadi di Fiji tahun 1987 selain berdampak bagi masyarakat Fiji sendiri, juga memberikan dampak bagi hubungan Fiji dengan dunia internasional. Berbagai macam kecaman diterima oleh pemberontak Fiji, baik dari negara-negara yang mempunyai kepentingan dengan Fiji atau pun negara-negara lainnya yang tidak berkepentingan. Kecaman-kecaman yang dilontarkan oleh mereka yang tidak berkepentingan terhadap Fiji tentunya dengan alasan kemanusiaan. Adapun negara-negara yang mengecam tindakan kudeta militer yang dipimpin oleh Letkol Sitiveni Rabuka ini, antara lain adalah sebagai berikut ini:

1. Australia

Australia adalah salah satu negara yang paling berkepentingan di kawasan Pasifik Selatan. Secara geografis, kepentingan Australia terhadap kawasan ini disebabkan oleh posisi negara-negara Pasifik Selatan, yang

⁴ Zulkifli Hamid, *Sistem Politik Pasifik Selatan*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1996, hlm. 73-74.

tersebar di sebelah utara dan timur Australia, yang berbatasan dengan Selandia Baru. Dalam posisi yang demikian, Pasifik Selatan merupakan jalur pelayaran kapal-kapal dari arah utara dan timur (AS dan Jepang) menuju Australia. Hal ini juga menimbulkan implikasi bagi keamanan Australia. Negara-negara kepulauan Pasifik Selatan merupakan “tameng” bagi pertahanan Australia. Oleh karena itu, keamanan wilayah tersebut harus tetap terpelihara, dan tidak boleh jatuh ke dalam penguasaan kekuatan-kekuatan yang “tidak bersahabat”. Untuk itulah Australia melaksanakan berbagai kebijaksanaan, baik ekonomi, politik maupun keamanan di kawasan ini.

Dalam mempertahankan keamanan dan kestabilan di kawasan Pasifik Selatan, terjadi beberapa perubahan dalam kebijaksanaan Australia. Sebelum PD II, Australia mengandalkan sistem pertahanan kawasan kepada Inggris. Kecewa terhadap sistem pertahanan Inggris, yang kurang memperhatikan kawasan pasifik Selatan, maka sesudah PD II, Australia – bersama-sama Selandia Baru-masuk dalam payung pertahanan AS, melalui perjanjian ANZUS di tahun 1951.

Pada dasawarsa 1980-an, Australia nampaknya harus mengubah pendekatan politik dan keamanannya terhadap Pasifik Selatan. Lingkungan kawasan ini menjadi lebih kompleks untuk menjamin kepentingan Australia. Hal ini ditandai oleh meningkatnya kehadiran negara-negara luar, yaitu US, Cina, Jepang, dan Libya, di kawasan Pasifik Selatan. US menandatangani perjanjian perikanan dengan Kiribati tahun 1985 dan dengan Vanuatu tahun

1987. Di samping itu, ia ikut memberikan dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Kaledonia Baru dan kebijaksanaan anti nuklir Pemerintahan Partai Buruh Selandia Baru, serta menandatangani protokol Perjanjian Rotonga 1985. Sementara Libya mengadakan kontak dengan *Front Uni de Liberation Kanak* (FULK) di Kaledonia Baru, dengan memberikan latihan militer kepada beberapa anggota partai tersebut. Selain itu, Libya juga akan membuka hubungan diplomatik dengan Vanuatu. Sementara itu, terjadi gejolak sporadis di kawasan tersebut. Antara lain terjadi kudeta di Fiji pada bulan April dan September 1987.⁵

Di Canberra Australia mengutuk kudeta militer di Fiji sebagai patut disesalkan dan menuntut pemulihan dengan segera demokrasi parlementer di negara pulau pasifik itu. Perdana menteri Bob Hawke mengatakan di parlemen bahwa pemerintah Australia, risau dan terganggu dan terus memantau dengan seksama situasi itu. Ia menambahkan juga bahwa ketidakmantapan di Pasifik Selatan mencemaskan Australia. Kejadian-kejadian hari ini patut disesalkan karena ini merupakan kudeta militer yang perama terhadap pemerintah terpilih di Pasifik Selatan.⁶

Dalam upaya memulihkan keamanan dan kestabilan di Fiji, Australia mengambil garis keras, namun usaha mengirimkannya ke wilayah

⁵ Zulkifli Hamid, *op.cit.*, hlm. 75-77.

⁶ Kedaulatan Rakyat, *Kabinet Baru Berhasil dibentuk: Negara-Negara Persemakmuran Mengutuk Pelaku Kudeta di Fiji, Edisi Sabtu Pon 16 Mei 1987 (18 Pasa 1919) Tahun XLII No. 225*, Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, 1987, hlm. 10.

tersebut menemui kegagalan, karena armada kapal perangnya dilarang memasuki wilayah perairan negara tersebut. Oleh karena itu, armada Australia hanya mampu mengadakan pengintaian di wilayah Fiji, yang sedang bergejolak itu. Upaya yang cukup efektif dilakukan Australia adalah memotong segala jenis bantuan serta memboikot perdagangan ke Fiji.⁷

Pasukan Australia telah dikirim ke Fiji untuk membantu pengevuasian warga berkebangsaan Australia dari pulau-pulau pasifik yang sedang bergejolak itu jika keadaan nanti sudah memaksa. Jurubicara Angkatan Darat Australia, Steve Delaney, mengungkapkan 120 orang telah meninggalkan pangkalan Townsville di Queensland Sabtu lalu untuk dikirim dengan kapal angkatan udara "Hercules" ke Pulau Norfolk, sekitar 950mil (1528 km) sebelah timur laut Sidney.

Dari Pulau Norfolk, suatu daerah administrasi Australia, serdadu Australia itu akan dikapalkan ke Fiji dengan kapal Angkatan Laut Australia, Kapal Hmas Tobruk. Kapal Hmas Tobruk diberangkatkan bersama 5 buah Kapal Angkatan Laut Australia lainnya, 4 diantaranya adalah kapal perang, yang akan selalu siap siaga diuar territorial perairan Fiji, ujar Delaney. Pasukan Australia itu dipergunakan untuk memberi bantuan, jika evakuasi orang berkebangsaan Australia dari Fiji itu dirasa perlu. Menurut taksiran sekitar 2.500 orang Australia sekarang siap diungsikan dari Fiji.

Memberikan komentar sehubungan dengan terbentuknya suatu dewan di Fiji. Perdana Menteri Bob Hawke mengatakan Hari Jumat bahwa

⁷ Zulkifli Hamid, *Sistem Politik Australia*, Bandung: LIP-FISIP/UI/PT Remaja Rosdakarya, 1999, hlm. 411-412.

Pemerintah Australia secara resmi tidak akan mengakui suatu dewan di Fiji yang diketuai oleh pemimpin kudeta Letkol Sitiveni Rabuka yang muncul sebagai pemerintah sementara.

Ketika berbicara dalam lawatannya di Melbourne, Hawke mengatakan bahwa ia yakin suatu pemecahan yang tepat terhadap krisis konstitusi di Fiji yaitu dengan memecat pemerintah Timochi Bavadra dalam meneruskan pemerintahannya sesuai dengan ketentuan sewaktu melakukan pemilihan. Tapi dia menambahkan selama Dr Bavadra mau menerima imbauan bagi pelaksanaan pemerintah baru, jalan yang tepat adalah dengan melakukan penarikan suara yang diselenggarakan dibawah undang-undang yang berlaku. Hawke dalam kesempatan itu memuji sikap Perdana Menteri Fiji yang tergulir tersebut.⁸

Sementara itu, akibat kudeta kedua yang dilakukan oleh Letkol Rabuka muncul berbagai reaksi dan tanggapan dari negara-negara sekitar, seperti Australia. Di Sidney, Australia mempertimbangkan sanksi ekonomi terhadap Fiji tetapi tidak akan memutuskan hubungan diplomatik sehubungan dengan kudeta kedua disana, kata Menteri Luar Negeri Bill Hayden, Senin. Hayden, yang kembali ke negeri setelah mempersingkat kunjungan ke AS mengatakan, Australia akan mengusahakan penyelesaian diplomatik dengan Kolonel Sitiveni Rabuka, yang merebut kekuasaan di negeri pulau Pasifik Selatan Jumat untuk kedua kalinya sejak 14 Mei, boleh jadi akan merupakan bagian dari pendekatan diplomatik.

⁸ Kedaulatan Rakyat, *Tahun XLII No. 234, op.cit.*, hlm.1,10.

Hayden mengatakan bahwa Pemerintah Australia sangat perlu mempunyai perwakilan di Fiji. Pemerintah Australia tidak dapat melindungi warga negara Australia dan kepentingan swasta lainnya disana bila kami memutuskan hubungan diplomatik Menurut Hayden, Jalur operasi Pemerintah Australia yang paling efektif adalah jalur diplomatik dan saat ini membenarkan prakarsa diplomatik. Menurutnya, ia tidak melihat pendekatan lainnya di luar itu. Kapal Perang Australia yang telah disiagakan akan digunakan untuk mengungsikan warga negara Australia bila situasi memburuk.

Pariwisata merupakan devisa utama Fiji dan negara tersebut menjadi tujuan paling digemari orang Australia yang sedang berlibur. Tetapi, ratusan orang Australia membatalkan liburan mereka ke sana setelah kudeta itu. Serikat Buruh Pelabuhan dan Maritim Australia mengumumkan larangan ekspor Australia ke Fiji sebagai reaksi atas penahanan para pemimpin Serikat Buruh Fiji di Suva.⁹

2. Selandia Baru

Selandia Baru memandang kawasan Pasifik Selatan sebagai wilayah strategis. Sebagai negara yang letaknya terpencil di ujung selatan, negara-negara kawasan Pasifik Selatan, yang letaknya di utaranya, menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik, ekonomi dan pertahanan negeri ini. Kawasan Pasifik Selatan merupakan

⁹ Kedaulatan Rakyat, *Selandia Baru dan AS Kutuk Kudeta di Fiji: Selandia Baru Kirim Kapal Perang, Edisi Senin Pon 27 September 1987 (3 Sapar 1919) Tahun XLII No.1*, Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, 1987, hlm.

jalur laut yang strategis bagi negeri ini, di samping pulau-pulau di kawasan itu merupakan *protective shield* bagi pertahanannya. Oleh karena itu, sejak menjadi koloni Inggris, Selandia Baru berambisi untuk menguasai wilayah Pasifik Selatan. Pada dasarnya, Selandia Baru merupakan mitra Australia dalam “memaksa” Inggris untuk memperluas imperiumnya di kawasan ini. Sejak 1901, Selandia Baru memperoleh kepercayaan untuk melaksanakan administrasi kolonial di Kepulauan Cook dan Nieu, serta menguasai wilayah Samoa Barat (1914) dan Tokelau (1925). Kedua negara itu juga sama-sama terlibat ala Perjanjian ANZUS setelah PD II berakhir.

Berbeda dengan Australia, politik kolonial Selandia Baru di Pasifik Selatan berubah setelah PD II. Suatu pemerintahan otonomi internal dikembangkan Selandia baru untuk menyerap aspirasi rakyat di wilayah jajahan. Pendekatan yang bersifat ekonomis lebih ditekankan, terutama untuk pembangunan ekonomi di wilayah jajahannya. Bahkan di awal tahun 1960-an, Selandia Baru adalah negara pertama di kawasan ini, yang melakukan dekolonisasi. Samoa Barat menjadi negara merdeka pada tanggal 1 Januari 1962, Kepulauan Cook menyatakan diri sebagai negara berpemerintahan sendiri, yang berasosiasi dengan Selandia Baru sejak tahun 1965, dan Nieu memperoleh kemerdekaan di tahun 1974. Namun, karena beberapa keterbatasan, Pemerintah Selandia Baru diberikan hak dan mempunyai tanggung jawab terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan pertahanan dan luar negeri kedua negara (Kepulauan Cook dan Nieu).

Sebagai pimpinan dalam dekolonisasi, Selandia Baru memiliki akses yang lebih baik dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Untuk itulah, Selandia Baru diminta oleh beberapa pemimpin negara-negara kawasan untuk merealisasikan pembentukan SPF di tahun 1971. Sebelumnya, Selandia Baru juga telah memberikan bantuan dana dan tenaga pengajar dalam rangka pembentukan *University of South Pasific (USP)* pada tahun 1968. Bahkan, kampus USP didirikan di lokasi bekas pangkalan Angkatan Udara Selandia Baru di Laucala bay, Fiji.¹⁰

Dalam menghadapi masalah dalam negeri negara-negara kawasan, Selandia Baru lebih menekankan dialog dan konsultasi dengan para pemimpin negara kawasan Pasifik Selatan. Namun, PM Lange juga menekankan bahwa Selandia Baru harus memberikan pertimbangan serius kepada permintaan bantuan (militer) dari pemerintahan lainnya di kawasan tersebut. Misalnya saja, Selandia Baru mengambil sikap yang keras ketika terjadi kudeta di Fiji pada bulan Mei dan September 1987.

Berbeda dengan Australia, Selandia baru tidak hanya memberikan sanksi ekonomi atas Fiji, melainkan juga mengirimkan dua kapal fregat ke perairan Fiji. Menurut Menteri Luar Negeri, Russel Marshall, kudeta Fiji tidak semata-mata merupakan pengambilalihan kekuasaan oleh pihak militer, tetapi melibatkan masalah hubungan ras antara penduduk pribumi dan keturunan India, yang secara tidak langsung akan menciptakan masalah potensial yang lebih besar di dalam negeri Selandia Baru. Potensi konflik di

¹⁰ Zulkifli Hamid, (1996) *op.cit.*, hlm. 80-81.

Selandia Baru berakar dari masalah antara ras Maori dan Pakela (kulit putih), yang sekarang semakin berkembang karena desakan-desakan ekonomis.

Terlebih lagi, militer Selandia Baru memiliki hubungan khusus dengan militer Fiji. Sejak tahun 1950-an, militer Selandia Baru melatih sejumlah kontingen militer Fiji, dan mereka dianggap sebagai bagian dari Angkatan Bersenjata (AB) Selandia Baru selama 12 bulan. Bahkan, lebih dari 20 tahun, sampai pertengahan tahun 1970-an, Selandia Baru memberikan seorang perwiranya sebagai Panglima AB Fiji, dan sampai awal tahun 1980-an, seorang perwira Selandia Baru tetap menjadi Kepala Staf AB Fiji. Oleh karena itulah, Selandia Baru sangat berkepentingan dalam kudeta militer yang terjadi di Fiji.¹¹

Di Wellington, Perdana Menteri David Lange mengatakan hari Kamis pemimpin kup militer di Fiji telah memberitahu para diplomat di sana bahwa ia telah bertindak untuk mencegah campur tangan militer terhadap bagian-bagian tertentu masyarakat.¹²

Dalam menghadapi kudeta di Fiji yang kedua kalinya, Perdana Menteri David Lange mengatakan hari sabtu bahwa Kapal Survai Angkatan Laut 'Monowai' telah berlayar menuju Fiji, bila diperlukan untuk mengungsikan warga negara Selandia Baru menyusul terjadinya kudeta

¹¹ *Ibid.*, hlm. 85.

¹² Kedaulatan Rakyat, *Tahun XLII No. 225, op.cit.*, hlm. 10.

kedua kalinya disana dalam empat bulan. Kapal tersebut diperkirakan tiba di perairan Fiji hari Selasa dan dapat mengungsikan 600 orang jika diperlukan.

Lange mengatakan bahwa 'Monowai' kapal non tempur tak bersenjata yang dpergunakan untuk tugas survai kelautan. Pemerintah Selandia Baru sangat memperhatikan personil diplomatik Selandia Baru dan sejumlah besar warga negara Selandia Baru yang berlibur di Fiji. 'Monowai' juga dikirim ke Fiji setelah kudeta 14 Mei untuk dipergunakan sebagai pengungsian tetapi hal itu tidak sempat terlaksana.¹³

Sementara itu Perdana Menteri Selandia Baru David Lange Sabtu, yang dengan sangat hati-hati menyambut "nama-nama Dewan Penasehat Fiji" sebagai upaya untuk kembali ke pemerintahan konstitusional mengatakan masih sangat pagi untuk mengutarakan pendapatnya tentang dewan ini. Selandia Baru tetap menganggap suatu keharusan agar pemerintahan konstitusional secara demokrasi parlementer kembali dilakukan di Fiji, Lange mengatakan dalam suatu pernyataan.

Oleh karena itulah, Selandia Baru tetap memberikan dukungan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Gubernur Jenderal Ratu Sir Penaia Ganulai sehubungan dengan masalah rakyat Fiji secara keseluruhan kami akan menyokong, tambah Lange. Pemerintah Lange telah banyak memberikan bantuan kepadanya dan juga kepada Mahkamah Agung Fiji dalam upaya mengembalikan Fiji ke pemerintahan konstitusional sejak

¹³ Kedaulatan Rakyat, *Selandia Baru dan AS Kutuk Kudeta di Fiji: Selandia Baru Kirim Kapal Perang, Edisi Senin Pon 27 September 1987 (3 Sapar 1919) Tahun XLII No.1*, Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, 1987, hlm. 1.

kudeta 14 Mei oleh Letkol Sitiveni Rabuka, sumber pemerintah mengatakan.¹⁴

3. Amerika Serikat

Kawasan Pasifik Selatan bukanlah kawasan yang penting bagi AS, sekalipun negara ini memiliki kepentingan ekonomi, politik, dan militer di berbagai kawasan di dunia, termasuk kawasan Pasifik Selatan.¹⁵ Pada prakteknya, amat sedikit yang dilakukan AS untuk kemakmuran wilayah Pasifik Selatan, AS hanya melakukan sesuatu di Pasifik Selatan jika kepentingan nasionalnya benar-benar terancam.

Dalam masalah nuklir, kebijaksanaan negara-negara Pasifik Selatan dipandang sangat mengganggu kepentingan nasional AS. AS kurang berkenan dengan pernyataan-pernyataan bahwa kawasan tertentu adalah kawasan bebas nuklir. Pada masa itu, negara-negara kawasan Pasifik Selatan telag berkembang semangat anti-nuklir. Sudah sejak tahun 1970-an, Australia dan Selandia Baru, yang merupakan sekutu AS, menegaskan sikap anti-nuklirnya.

Dalam masalah kudeta militer di Fiji pada bulan Mei dan September 1987, tampaknya sebagian permasalahan juga disebabkan permasalahan anti-nuklir ini. tidak dapat disangkal bahwa kudeta di Fiji berakar pada masalah rasialis. Namun, terdapat beberapa peristiwa yang bisa menunjukkan bahwa AS kemungkinan besar berperan dalam menjatuhkan pemerinah terpilih di bawah Timoci Bavadra. Isu nuklir telah berkembang di Fiji sejak awal

¹⁴ Kedaulatan Rakyat, Tahun XLII No. 234, *loc.cit.*, hlm. 10.

¹⁵ Zulkifli Hamid, *op.cit.*, hlm. 86.

1980-an dan AS terus berupaya untuk meredamnya melalui bantuan militer dan ekonomi. Agar isu nuklir tak terlalu keras menjelang pemilu tahun 1982, PM Ratu Sir Kamisese Mara saat itu menerapkan kebijakan melarang kunjungan kapal-kapal AS. Pada tahun 1983, larangan tersebut dicabut, setelah ia mengunjungi pangkalan Armada Pasifik AS di Hawaii bersama Dutabesar AS di Fiji, Fred Eckert. Tindakan Mara ini mendapatkan penghargaan dari Presiden Reagan ketika Mara ke Washington pada tahun 1984.

Pada pemilu tahun 1987, partai-partai oposisi di bawah pimpinan Dr. Timoci Bavadra bisa memenangkan pemilu. Dengan tema “akan memberlakukan kembali larangan-larangan terhadap kunjungan kapal-kapal nuklir AS dan menerapkan politik luar negeri non-blok”, sehingga dapat mengalahkan dominasi Partai Aliansi, pimpinan Ratu Mara. Hal ini tentunya mengkhawatirkan AS. Karena itu, diduga keras AS bekerjasama dengan Letnan Kolonel Sitiveni Rabuka untuk menjatuhkan PM Bavadra.

Beberapa fakta mengungkapkan hal tersebut ketika Rabuka mengungkapkan kekhawatiran Rabuka terhadap kebijakan anti-nuklir Bavadra sehingga ia melakukan kudeta. Kedua, Jenderal Vernon Walters, yang dikenal dalam operasi-operasi CIA, berada di Fiji menjelang terjadinya kudeta. Agen-agen CIA juga dilihat oleh pejabat Fiji bersama-sama Rabuka.¹⁶

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 88-90.

Masalah keterlibatan AS ini diungkapkan oleh Bavadra ketika berkunjung ke Australia dan AS, beberapa waktu setelah dibebaskan dari tahanan militer, dalam rangka menarik dukungan negara-negara tersebut untuk pemulihan pemerintahannya, Bavadra antara lain mengatakan bahwa keterlibatan CIA dalam kudeta tersebut disebabkan karena pemerintahannya akan menutup pelabuhan-pelabuhan Fiji bagi kapal-kapal Angkatan Laut AS. Menanggapi tuduhan tersebut, satu-satunya pernyataan resmi pemerintah AS datang dari Dutabesar AS untuk Australia, William Lane, yang menolak semua tuduhan tersebut. Sekalipun ia tidak menolak adanya indikasi-indikasi yang dituduhkan oleh Bavadra dan anggota kabinetnya, namun semua itu tidak ada kaitannya dengan kudeta.¹⁷

Kelompok Bavadra juga mengungkapkan adanya dugaan adanya dana dari USAID yang dipakai oleh kelompok ekstrimis Taukei untuk melakukan demonstrasi-demonstrasi. Hal lainnya adalah kunjungan PM Mara ke kantor pusat Panglima Armada Pasifik beberapa saat menjelang kudeta, dan juga adanya tawaran Menlu Shultz kepadanya untuk memberikan bantuan dana kepada pemerintah baru Fiji setelah kudeta. Fakta lain adalah kunjungan kapal USS Belleau Wood dan mendaratnya tiga Hercules Angkatan Udara AS di bandara Nadi sebulan setelah kudeta.¹⁸

Dalam menghadapi kudeta kedua yang dilakukan oleh Letkol. Rabuka Di Washington, sambil menyatakan bahwa AS mengutuk kudeta itu,

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 110-111.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 90.

jurubicara Departemen Luar Negeri AS Phyllis Oakley memperingatkan para wistawan Amerika agar menjauhi daerah-daerah terpencil negara pulau tersebut. Oakley mengemukakan situasi di Fiji memang tenang, tetapi ia memperingatkan para wisatawan agar selalu dekat dengan daerah-daerah wisata dan selalu berhubungan dengan kedutaan.¹⁹

4. Perancis

Perancis adalah satu-satunya negara Eropa yang masih memiliki daerah jajahan di Pasifik Selatan. Wilayah-wilayah tersebut mencakup Polinesia Perancis, Kaledonia Baru dan Wallis & Futuna. Perancis sendiri membangun suatu laboratorium nuklir di Kaledonia Baru, dan pangkalan uji coba senjata nuklir di Polinesia Perancis yang pembangunannya dimulai sejak tahun 1966. Fasilitas-fasilitas tersebut merupakan program riset jangka panjang, yang tidak pernah terhenti sekalipun terjadi pergantian pemerintahan di Perancis.²⁰

Ketika kudeta militer terjadi di Fiji, berbagai reaksi segera datang dari berbagai negara, terutama Perancis yang langsung berkepentingan terhadap wilayah itu dan beberapa negara persemakmuran lainnya. Menteri urusan luar negeri Perancis Bernard Pons melukiskan Kamis bahwa kudeta tidak berdarah di Fiji sangat mengkhawatirkan dan peristiwa itu menandakan

¹⁹ Kedaulatan Rakyat, *Tahun XLII No.1, loc.cit.*

²⁰ *Ibid.*, hlm. 92-93.

pentingnya kehadiran pasukan Perancis di Pasifik sebagai benteng bagi ketidak stabilan negara itu.

Pons mengatakan kepada para wartawan dalam kunjungannya ke New Kaledonia, wilayah Pasifik Selatan milik Perancis, bahwa Peristiwa itu mengakibatkan keadaan di kawasan itu cenderung mencemaskan. Dia mengatakan kudeta militer di Fiji yang merupakan negara pulau itu Kamis dinihari menunjukkan bahwa timbulnya ketidakstabilan bukan akibat kehadiran Perancis di New Kaledonia. Namun sebaliknya kehadiran Perancis ini merupakan suatu alat pembawa stabilitas karena Perancis menjamin tegaknya demokrasi.²¹

5. Indonesia

Secara geostrategis, Indonesia terletak di dalam dua lingkaran kawasan yang dinamis, yaitu Asia Tenggara dan Pasifik Selatan. Perkembangan-perkembangan yang terjadi di kedua kawasan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan mempunyai dampak bagi kepentingan nasional Indonesia.

Perkembangan di kawasan Pasifik Selatan mulai menunjukkan pergolakan sejak pertengahan tahun 1970-an sampai dasawarsa 1980-an. Antara lain masalah nuklir, dekolonisasi di Kaledonia Baru, peningkatan persaingan negara-negara adikuasa, serta munculnya sikap anti-Indonesia dari beberapa negara di kawasan tersebut. Untuk mencegah munculnya dampak negatif dari perkembangan di kawasan itu, maka Indonesia perlu

²¹ Kedaulatan Rakyat, *Tahun XLII No. 225, loc.cit.*

memberikan perhatian terhadap kawasan Pasifik Selatan. Itu sebabnya, sejak tahun 1978 sampai tahun 1993 GBHN menetapkan bahwa kawasan Pasifik Selatan perlu mendapatkan perhatian “khusus” dalam politik luar negeri Indonesia.²²

Ketika kudeta militer di bawah kolonel Sitiveni Rabuka di Fiji terjadi dan pemerintahan yang sah digulingkan, banyak negara melakukan pemboikotan terhadap pemerintahan baru tersebut. Tetapi Indonesia terus mendukung junta. Delegasi dari rezim Rabuka diutus mengunjungi Indonesia. Diberitakan bahwa Rabuka dan stafnya mengagumi Indonesia di bawah pimpinan Soeharto karena peran sentral yang dimainkan oleh militer Indonesia, baik dalam masalah politik maupun ekonomi. Pihak berwenang Fiji yang baru ingin memakai Undang-Undang Dasar Indonesia sebagai model.

Suatu misi perdagangan Indonesia tidak resmi dikirim ke Fiji. Presiden menawarkan Fiji 25.000 ton beras secara kredit dan fasilitas pembayaran khusus. Benny Moerdani juga mengumumkan di Jakarta bahwa ia telah menyetujui pengiriman delegasi militer tingkat tinggi ke Fiji dalam rangka untuk membentuk semacam aliansi. Menteri Luar Negeri Indonesia, Mochtar juga menghendaki hubungan yang erat dengan Fiji. Sesungguhnya Indonesia ingin memainkan suatu peran yang lebih besar di

²² Zulkifli Hamid, *op.cit.*, hlm. 103-104.

Pasifik Selatan dengan memperkuat para pemimpin di Papua New Guinea dan Fiji.²³

6. India

India mengutuk keras kudeta yang terjadi pada hari itu di Fiji, dengan melukiskannya sangat tragis, sementara di Washington, Amerika Serikat juga mengutuk kudeta militer itu. Ketika memberikan komentar mengenai berita di Suva, Kolonel Sitiveni Rabuka mengadakan kudeta untuk kedua kalinya dalam lima bulan belakangan ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri India mengatakan bahwa Pemerintah benar-benar merasa gelisah mendengar angkatan bersenjata mengambil alih kekuasaan lagi di Fiji. Dan Pemerintah India benar-benar mengutuk keras hal itu.

Jurubicara itu, ketika memberikan penjelasan kepada para wartawan di Ibukota India, New Delhi, mengutip ucapan Menteri Negara Urusan Luar Negeri K Natwaroaluidh menyebutkan bahwa sangat tragis karena hal itu terjadi pada saat proses perundingan yang sedang berlangsung di Fiji untuk meratakan jalan bagi kerukunan nasional. Pemerintah India mengharapkan agar proses perukunan itu akan diteruskan, supaya pulih perdamaian dan keharmonisan di negeri itu.²⁴

Jurubicara Kementerian Luar Negeri di New Delhi mengatakan bahwa Perdana Menteri India Rajif Gandhi telah menyurati rekan sejawatnya di

²³ Leo Suryadinata, *Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto*, Jakarta: LP3ES, 1998, hlm. 126.

²⁴ Kedaulatan Rakyat, *Tahun XLIII No.1*, *loc.cit.*

Inggris, Australia, dan Selandia Baru, menyerukan kerja sama memulihkan demokrasi di Fiji. Gandhi juga telah menyurati Sekretaris Jenderal Persemakmuran Shridath Ramphal, sementara India mempertimbangkan langkah diplomatik selanjutnya menyangkut Negara Kepulauan di kawasan Pasifik Selatan itu. Dalam suratnya, Gandhi menggarisbawahi pentingnya konstitusi Fiji tahun 1970, yang kata Gandhi diupayakan diubah oleh para pemimpin kudeta militer agar dapat merusak kestabilan orang-orang Fiji keturunan India, serta keharmonisan rasial di sana.

Menurut jurubicaranya, Gandhi telah mengatakan kepada PM Inggris, Maargareth Thatcher, PM Australia Bob hawke, dan PM Selandia Baru David Lange, bahwa hal itu merupakan suatu usaha yang perlu kita kerjakan bersama-sama dan tekuni guna memulihkan keadaan seperti sedia kala di Fiji. Jurubicara itu juga mengemukakan bahwa tujuan dari surat Gandhi itu adalah langkah-langkah penting hendaknya dilakukan untuk mengembalikan demokrasi parlementer Fiji dan mensahkan pemerintahan terpilih.²⁵

7. Papua Nugini

Pemerintah Papua Nugini (PNG) hari Minggu mengecam pengambilalihan kekuasaan oleh militer di Fiji dan menyerukan pemulihan demokrasi di Fiji. Perdana Menteri Paias Wingti mengatakan dalam sebuah pernyataannya bahwa pemerintah demokratis sepenuhnya harus dipulihkan

²⁵ Kedaulatan Rakyat, *Tanggapan Kudeta di Fiji, Gandhi: Pulihkan Demokrasi, Lange: Lindungi Bavadra, Edisi Sabtu Kliwon 23 Mei 1987 (25 Pasa 1919) Tahun XLII No. 232*, Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, 1987, hlm. 12.

di Fiji secepat mungkin. Dikatakannya pula bahwa Pemerintah PNG tidak mengakui orang atau kelompok lainnya manapun kecuali gubernur Fiji dan akan mempertahankan sikap ini sampai gubernur jenderal mengumumkan perubahan keadaan apapun. Wingti hingga kini menolak memberi komentar mengenai kudeta militer Kamis lalu, kecuali mengatakan bahwa masalah itu adalah masalah dalam negeri yang harus diselesaikan oleh Fiji sendiri.

Menteri Luar Negeri Ted Diro sebelumnya menyerukan kekuatan asing untuk tidak mencampuri dan mendukung pemimpin kudeta Letnan Kolonel Sitiveni Rabuka. Pernyataan Perdana Menteri, Wingti mengatakan bahwa pemerintahnya mengecam tindakan tidak demokratis yang memalukan ini dan menyatakan kesedihan yang mendalam bahwa demokrasi dan stabilitas di pasifik telah dirusak oleh kelompok radikal yang kecil.²⁶

8. Inggris

Di London, Sekjen Persemakuran yang beranggota 49 negara, Shridath S. Ramphal mengatakan Kamis menyesalkan kup militer di Fiji itu. Ia mengimbau semua pihak yang berkepentingan agar memutarbalik perkembangan yang buruk itu dengan segera dan menempatkan Fiji lagi di jalan demokratik yang sudah ditempuhnya sejak kemerdekaan.²⁷

²⁶ Kedaulatan Rakyat, *Papua Nugini Mengecam Kudeta Militer di Fiji, Edisi Selasa Legi 19 Mei 1987 (21 Pasa 1919) Tahun XLII No. 228*, Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, 1987, hlm. 10.

²⁷ Kedaulatan Rakyat, *Tahun XLII No. 225, loc.cit.*

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Inggris dan Kantor Commonwealth di London menyatakan belum menerima informasi tentang kudeta di daerah bekas jajahannya itu dan belum memberikan komentar dalam masalah kudeta Fiji yang kedua kalinya pada bulan September.²⁸

Menyikapi akan masalah kudeta di Fiji, Ratu sendiri mendesak Gani Lau agar tetap kokoh pada sikapnya dan Sekjen Persemakmuran Shridath Ramphal, Rabu lalu memperingatkan bahwa Fiji akan kehilangan dari keanggotaannya dari persemakmuran jika negara itu menjadi republik.²⁹

²⁸ Kedaulatan Rakyat, *Sepuluh Tentara Fiji Gagal Lakukan Kudeta*, Edisi Jumat Pahing 15 Mei 1987 (17 Pasa 1919) Tahun XLII No. 224, Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, 1987, hlm. 1.

²⁹ Kedaulatan Rakyat, *Rabuka Masih Optimis Dapat Berkuasa Lagi*, Edisi Jumat Wage 22 Mei 1987 (24 Pasa 1919) Tahun XLII No. 231, Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, 1987, hlm. 1.